

Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Produk Domestik Bruto terhadap Indeks Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara barat

Suparlan¹, Dewi Rispawati²

^{1,2} Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: suparlan23@staff.unram.ac.id, dewirispawati@staff.unram.ac.id

Article History:

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 16 Oktober 2025

Accepted: 18 Oktober 2025

Keywords: DBH, Pajak Daerah, PDRB dan IPM

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015-2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sementara Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan efektivitas pemanfaatan dana transfer pusat dan pendapatan asli daerah masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di masa depan.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia dalam konteks pembangunan daerah menjadi tolok ukur penting bagaimana hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati dalam aspek nilai tambah ekonomi, tetapi juga dalam aspek kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator komposit yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan pelayanan inti: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, untuk mendorong kenaikan IPM, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat kebijakan fiskal daerah agar dana publik dapat dialokasikan secara efektif untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kesejahteraan manusia.

Daerah Sebagian besar masih tergantung pada Dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk menggerakkan Pembangunan di Daerah. Nurdin et al. (2024) menyatakan Transfer fiskal

berpengaruh terhadap peningkatan IPM melalui belanja Publik. Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan lokal. Dengan kewenangan fiskal seperti memungut pajak daerah serta menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menyesuaikan program pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. DBH menjadi salah satu instrumen fiskal utama yang mendukung kapasitas anggaran daerah di samping pajak daerah. Wardani (2024) menemukan bukti empiris bahwa DBH termasuk salah satu komponen dana perimbangan yang memengaruhi IPM. Melalui DBH, pemerintah pusat mendistribusikan sebagian pendapatan pusat ke daerah penghasil, dengan tujuan memperkecil ketimpangan fiskal antarwilayah. Jika DBH dapat dikelola dan dialokasikan dengan efisien ke sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial, maka potensinya untuk mempercepat peningkatan IPM sangat besar. Sari dan Lestari (2021) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, menimbulkan tantangan pada penggunaannya pada kegiatan yang tepat. Sedang penelitian Ina dan Hudang (2024) menyebutkan DBH berpengaruh terhadap IPM karena dimungkinkan dana tersebut disalurkan secara tepat untuk Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur. Kondisi keuangan daerah menunjukkan pada Tahun 2023 bahwa penerimaan transfer pusat (termasuk DBH) membentuk porsi penting dari total pendapatan daerah dalam struktur APBD. Suparlan dan Rispawati (2025) menyebutkan DBH dari pajak dan Non Pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM NTB tidak hanya disebabkan oleh satu faktor namun juga oleh penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan sejauh mana daerah mampu mandiri dalam membiayai pembangunan. Data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB memperlihatkan bahwa realisasi pajak daerah provinsi terus meningkat. Kenaikan penerimaan pajak daerah ini memperlihatkan bahwa potensi PAD di NTB mulai ditangkap oleh pemerintah provinsi. Dewi *et al.* (2024) menyebutkan penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM Daerah karena akan mendorong penggalan dalam pembiayaan Pembangunan. Kenaikan tersebut langsung diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas manusia IPM. Firmansyah dan Ramadhani (2022) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap IPM, menunjukkan bahwa penggunaan pajak daerah digunakan secara tepat karena manfaatnya dirasakan masyarakat. Satoto (2023) menyebutkan pajak daerah berkontribusi mendukung indikator Pembangunan manusia. Faktor lain yang memicu kenaikan IPM dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, baik secara regional maupun nasional. Astuti dan Hamzah (2025) menemukan pajak daerah dan DBH mampu meningkatkan IPM, ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut secara efisien dan efektif. Kemampuan daerah mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak daerah menyebabkan daerah akan memiliki peluang besar dalam mendorong peningkatan IPM Daerah. Hapiz (2025) menyebutkan penerimaan pajak daerah mempercepat peningkatan IPM Daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi penting dalam mendorong pergerakan persentase peningkatan IPM.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kinerja ekonomi wilayah sebagai hasil dari produksi barang dan jasa. Herlambang dan Rachmawati (2023) menyebutkan PDRB berpengaruh terhadap IPM dikarenakan kesejahteraan meningkat. Kegiatan ekonomi bergerak dengan cepat menunjukkan perputaran uang menjadi tinggi berdampak pada pendapatan Penduduk merata. Maulida dan Santoso (2020) menyebutkan pertumbuhan ekonomi menjadi penghubung antara PAD dan peningkatan IPM. Publikasi BPS menyebut bahwa PDRB NTB menurut pendekatan pengeluaran mengalami pertumbuhan yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto secara agregat memberikan

kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode tersebut. Wijayanti dan Raihansyah (2024) menyebutkan PDRB terbukti sebagai pendorong penting pergerakan IPM. Teori pertumbuhan endogen (Romer, 1986), kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan) bukan hanya dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi modal penting yang meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan itu sendiri. Yuliana dan Hartono (2023) menyebutkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM, menunjukkan penerimaan daerah yang tinggi dapat dianggarkan dalam mempercepat Pembangunan di berbagai sektor unggulan.

Data IPM terbaru dari BPS Provinsi NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2023 IPM NTB mencapai 72,37 naik dari 71,65 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan capaian dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita) serta akses pendidikan dan kesehatan. Kenaikan IPM ini tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan DBH atau pajak daerah. Meskipun PDRB terus tumbuh, apabila distribusi pendapatan tidak merata, maka dampaknya terhadap IPM akan terbatas. Di NTB, sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan pertambangan telah menyumbang terhadap pertumbuhan PDRB, tetapi kapasitas daerah untuk menerjemahkan pertumbuhan tersebut menjadi peningkatan kualitas manusia masih menghadapi tantangan sebagaimana teori keuangan publik (Musgrave & Musgrave, 1989) menyebutkan bahwa alokasi anggaran publik yang efektif melalui pajak dan transfer fiskal harus diarahkan ke sektor sosial agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah:

1. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh Signifikan terhadap IPM di Provinsi NTB?
3. Apakah PDRB berpengaruh Signifikan terhadap IPM di Provinsi NTB?

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Hubungan antara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat (dapat dijelaskan melalui beberapa teori ekonomi dan pembangunan yang saling melengkapi. Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972), pelimpahan kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah melalui penerimaan pajak daerah dan DBH memungkinkan daerah mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan dari DBH dan pajak daerah, semakin besar kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan IPM. Di NTB, transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui DBH terbukti menjadi salah satu sumber pembiayaan utama untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial, khususnya di daerah dengan kapasitas fiskal.

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen (Romer, 1986) menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks NTB, pembangunan manusia yang tercermin dari peningkatan IPM mendorong pertumbuhan PDRB karena masyarakat dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik mampu berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB juga memberikan efek balik terhadap peningkatan IPM melalui

peningkatan pendapatan daerah dan daya beli masyarakat. Ketika ekonomi daerah tumbuh, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program sosial. Dengan demikian, terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, di mana peningkatan PDRB memperkuat IPM dan sebaliknya.

Teori Keuangan Publik

Teori Keuangan Publik (Musgrave & Musgrave, 1989) dan Teori Pembangunan Manusia (Todaro & Smith, 2015) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan publik merupakan kunci keberhasilan pembangunan manusia. Alokasi anggaran yang bersumber dari pajak daerah dan DBH seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Peningkatan PDRB tanpa disertai distribusi hasil pembangunan yang adil tidak akan berdampak signifikan terhadap IPM. Kebijakan fiskal di NTB perlu diarahkan tidak hanya untuk memperbesar kapasitas fiskal daerah, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah. Dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan DBH, optimalisasi pajak daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah berperan sinergis dalam mempercepat peningkatan IPM.

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* adalah indikator komposit yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menilai sejauh mana suatu wilayah berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi utama: (1) umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup; (2) pengetahuan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; serta (3) standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita. Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan-pilihan masyarakat agar mereka dapat menikmati kehidupan yang produktif dan bermartabat. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak semata diukur melalui pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Program peningkatan Pembangunan daerah memiliki sasaran pada upaya mendorong pergerakan IPM yang indikator utamanya Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur. Anggaran yang bersumber dari Dana perimbangan digunakan untuk pembangunan daerah. Abdillah (2021) menyatakan bahwa *Dana Perimbangan* mendorong peningkatan IPM Daerah. Dalam konteks daerah, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan, terutama melalui pengelolaan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dana Bagi Hasil (DBH) dan Relevansinya terhadap IPM

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah serta memberikan insentif bagi daerah penghasil sumber daya alam Menurut Halim (2021), DBH berfungsi meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar dapat membiayai kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Liyana (2023) dan Soenarko (2023) menyebutkan DBH Pajak memiliki pengaruh terhadap IPM namun tidak selalu signifikan. Efektivitas DBH dalam mendorong IPM sangat bergantung pada efisiensi alokasi anggaran daerah. Jika dana tersebut tidak diarahkan secara strategis ke sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia, dampaknya terhadap IPM menjadi tidak signifikan.

Beberapa penelitian, seperti Sari & Lestari (2021), menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penggunaan DBH yang masih terfokus pada belanja infrastruktur fisik dan belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas SDM. Rizkiyah dan Anitasari (2023) menemukan dana perimbangan termasuk DBH mendukung peningkatan IPM.

Pajak Daerah dan Kaitannya dengan Pembangunan Manusia

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Prasetyo (2021) menyatakan PAD di dalamnya pajak daerah berdampak pada peningkatan IPM. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak PBB-P2. Menurut Musgrave & Musgrave (1989), pajak daerah berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan alat kebijakan ekonomi daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah memungkinkan pemerintah daerah memperluas pelayanan publik, memperbaiki sarana pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Penelitian oleh Firmansyah dan Ramadhani (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap IPM, meskipun dalam beberapa kasus efeknya baru terasa dalam jangka panjang. Pajak daerah yang efektif bukan hanya meningkatkan penerimaan fiskal, tetapi juga menjadi indikator aktivitas ekonomi lokal yang produktif.

Dalam konteks NTB, potensi pajak daerah cukup besar terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan sistem digitalisasi perpajakan daerah. Jelina *et. al* (2024) menyatakan pajak daerah, belanja pemerintah, dan IPM saling terkait dalam model PDRB; pajak daerah berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang berpotensi meningkatkan IPM jika dialokasikan ke sektor produktif. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar peluang peningkatan kualitas layanan publik, yang berdampak positif terhadap pembangunan manusia.

Produk Domestik Regional Bruto dan Kaitannya dengan IPM

PDRB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB sering dijadikan indikator utama untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja, yang pada akhirnya memperbaiki standar hidup dan meningkatkan IPM. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan output ekonomi suatu daerah secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi hasil pembangunan berlangsung merata. Namun, jika pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada sektor tertentu atau kelompok tertentu, maka pengaruhnya terhadap IPM akan terbatas. Penelitian oleh Yuliana dan Hartono (2023) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, apabila diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan, akan memberikan dampak positif terhadap dimensi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks NTB, pertumbuhan ekonomi selama 2015-2024 cukup fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh sektor pertambangan, pariwisata, dan pertanian. Peningkatan PDRB yang tidak disertai pemerataan ekonomi berpotensi menciptakan kesenjangan kesejahteraan, sehingga efek terhadap IPM menjadi terbatas.

Pengembangan Hipotesis

Dana Bagi Hasil terhadap IPM

Dana Bagi Hasil merupakan instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada

daerah dengan tujuan meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Beberapa penelitian empiris, seperti Sari dan Lestari (2021) serta Astuti dan Hamzah (2025), menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap IPM, meskipun signifikansinya bergantung pada efektivitas alokasi anggaran. Jika pemerintah daerah menggunakan DBH untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial, maka dampaknya terhadap IPM akan lebih besar.

Dengan demikian, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap IPM

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Prima et al. (2023) menyatakan efisiensi keuangan daerah dan penerimaan pajak local mempengaruhi IPM. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pajak daerah yang optimal memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja publik pada sektor-sektor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Firmansyah dan Ramadhani (2022) dan Maulida dan Santoso (2020) membuktikan bahwa peningkatan pajak daerah berdampak positif terhadap IPM, karena peningkatan penerimaan pajak memungkinkan peningkatan belanja pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun demikian, efeknya seringkali tidak langsung karena bergantung pada kebijakan belanja daerah dan efisiensi administrasi pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, karena menggunakan data berupa angka yang menggunakan alat uji statistik. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari situs resmi mentri keuangan untuk data Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan PDRB. Data IPM diperoleh dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Objek penelitian dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tahun amatannya selama sepuluh tahun dari 2015 sampai dengan 2025.

Data ini diolah menggunakan regresi linier berganda karena variabel yang digunakan terdiri dari variabel Independen terdiri dari tiga yaitu DBH, Pajak Daerah dan PDRB, sedangkan variabel dependennya yaitu IPM. Terlebih dahulu data akan diujikan asumsi klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh anata variabel dependen dan variabel independent maka alat uji yang digunakan berupa hasil uji t dengan membandingkan nilai t hitung dan nilai t table dan nilai signifikansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji asumsi klasik terhadap model penelitian telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan outokorelasi menunjukkan semuanya terpenuhi maka model regresi linier berganda ini layak digunakan untuk melakukan prediksi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji sejauh mana Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dan PDRB berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1. Hasil Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.985 ^a	0.971	0.956	0.541

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,956 memperkuat kesimpulan sekitar 95,6% variasi IPM tetap dapat dijelaskan oleh variabel DBH, Pajak Daerah, dan PDRB sementara sisanya 4,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Maka meskipun dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel, model masih menunjukkan tingkat kecocokan (*goodness of fit*) yang sangat tinggi.

Tabel 2. Hasil Uji ANOVA (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58.831	3	19.610	66.922	.000 ^b
	Residual	1.758	6	0.293		
	Total	60.589	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 66,922 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki *goodness of fit*. Artinya, variabel Dana Bagi Hasil (X_1), Pajak Daerah (X_2), dan Produk Domestik Regional Bruto (X_3) dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Hasil Uji t

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	58.450	.860		67.991	.000
	X1	-2.020E-12	0.000	-.084	-.915	.395
	X2	0.007	0.001	.999	8.746	.000
	X3	1.316E-8	0.000	.051	.485	.645

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel Coefficients, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 58.450 - 2.020E^{-12}X_1 + 0.007X_2 + 1.316E^{-8}X_3 + \varepsilon$$

di mana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia
X₁ = Dana Bagi Hasil
X₂ = Pajak Daerah
X₃ = Produk Domestik Regional Bruto
ε = error term

Hipotesis 1 Dana Bagi Hasil terhadap IPM

Hipotesis 1 dalam penelitian tidak terdukung, ditunjukkan oleh Nilai t-hitung sebesar -0,915 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,234, serta nilai Sig. 0,395 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Arah koefisien negatif (-2.020E-12) menunjukkan hubungan terbalik, tetapi pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti besarnya Dana Bagi Hasil tidak serta merta meningkatkan IPM.

Hipotesis 2 Pajak Daerah terhadap IPM

Hipotesis 2 dalam penelitian terdukung, ditunjukkan oleh Nilai t-hitung sebesar 8,746 jauh lebih besar dari t-tabel sebesar 2,234, dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Koefisien sebesar 0,007 menandakan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Pajak Daerah akan meningkatkan IPM sebesar 0,007 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai Beta standar (0,999) juga paling tinggi dibanding variabel lainnya, sehingga Pajak Daerah merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi peningkatan IPM.

Hipotesis 3 Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 3 dalam penelitian tidak terdukung, ditunjukkan oleh Nilai t-hitung sebesar 0,485 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,234, serta Sig. 0,645 > 0,05, menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Walaupun koefisiennya positif (1.316E-8), hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB belum secara langsung tercermin dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai t-hitung sebesar -0,915, lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,234, dengan nilai signifikansi 0,395 > 0,05. Hal ini berarti secara statistik DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arah hubungan negatif meskipun tidak signifikan menunjukkan bahwa peningkatan DBH tidak selalu diikuti oleh peningkatan IPM.

Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Lestari (2021) serta Astuti dan Hamzah (2025) yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan IPM, dengan catatan efektivitas penggunaan dana menjadi faktor penentu utama. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam pola pemanfaatan DBH di daerah penelitian. Pada kenyataannya, sebagian besar DBH di NTB masih diarahkan untuk belanja rutin dan pembiayaan infrastruktur fisik, bukan secara langsung pada sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen utama peningkatan IPM. Dengan demikian, walaupun secara teori dan penelitian terdahulu DBH diharapkan meningkatkan IPM melalui pemerataan fiskal dan peningkatan kapasitas daerah, dalam konteks NTB pengaruh tersebut belum tampak signifikan, kemungkinan karena alokasi DBH belum secara efektif mendukung pembangunan

manusia secara langsung.

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki nilai t-hitung sebesar 8,746, lebih besar dari t-tabel 2,234, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koefisien positif sebesar 0,007 menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah mampu mendorong peningkatan IPM secara nyata. Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Firmansyah dan Ramadhani (2022) serta Maulida dan Santoso (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berdampak positif terhadap IPM melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai sektor publik. Selain itu, penelitian Prima et al. (2023) juga mendukung hasil ini, di mana efisiensi keuangan daerah dan optimalisasi pajak lokal terbukti memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat.

Secara teori, temuan ini memperkuat pandangan Musgrave dan Musgrave (1989) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Melalui peningkatan penerimaan pajak, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H_2) bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap IPM, sekaligus mengonfirmasi teori keuangan publik dan hasil penelitian empiris terdahulu.

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis, variabel PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 0,485, lebih kecil dari t-tabel 2,234, dengan tingkat signifikansi $0,645 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun koefisien regresi bernilai positif ($1.316E-8$), pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik.

Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Auliya *et al.* (2024), Rohmi et al. (2024), dan Yuliana & Hartono (2023) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, terutama ketika pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan disertai pemerataan pendapatan. Namun demikian, hasil penelitian ini masih dapat dijelaskan secara kontekstual. Pertumbuhan ekonomi di NTB dalam beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan (seperti tambang tembaga dan emas) yang bersifat padat modal, tetapi tidak menyerap banyak tenaga kerja lokal. Akibatnya, meskipun PDRB meningkat, tidak semua lapisan masyarakat menikmati manfaat ekonomi tersebut, sehingga dampaknya terhadap IPM menjadi lemah.

Hasil ini juga mendukung pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan pembangunan manusia apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif. Dengan demikian, meskipun secara teori menurut Romer (1986) pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam konteks NTB pengaruhnya belum signifikan karena ketimpangan sektor dan distribusi pendapatan yang masih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di NTB. Pajak Daerah berperan penting dalam

memperkuat kapasitas fiskal daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

2. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya transfer fiskal dari pusat melalui DBH belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTB belum bersifat inklusif; peningkatan output ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, F. (2021). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. UMM Scientific Journals.
- Apriska, L., & Irwan, M. (2024). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, PDRB dan Variabel Sosial terhadap IPM Kabupaten/Kota di NTB*. *Jurnal Sains Kesehatan Masyarakat (JSEH)*, Universitas Mataram. Retrieved from <https://jseh.unram.ac.id>
- Auliya, M., Rahmah, M., Saharuddin, & Trisniarti, N. (2024). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, Universitas Malikussaleh.
- Firmansyah, A., & Ramadhani, R. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*.
- Gunawan, D. S., Widyatama, G. P., & Suharno, S. (2024). *Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. *Jurnal EKONOMIKA45*, Universitas 45 Surabaya.
- Herlambang, B., & Rachmawati, R. (2023). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (2017–2020)*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). *Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. Retrieved from <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id>
- Jelina, J., Jesica, S., & Mirna, S. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Pemerintah, dan IPM terhadap PDRB di Sumatera Utara*. *Rayyan Jurnal*. Retrieved from <https://rayyanjurnal.com>
- Liyana, N. F. (2023). *Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak dan Pembangunan Daerah di Indonesia*. *Balance Vocation Accounting Journal*, Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Maulida, D., & Santoso, A. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Penghubung antara PAD dan Peningkatan IPM*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*.
- Misfi Laili Rohmi, A., Normadila, A. A., & Haq, A. D. (2024). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan (2017–2021)*. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(1). Area Journal.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Musyitari, M., & Warunayama, W. (2024). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan*

-
- Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate. Warunayama Journal.*
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Prasetyo, A. D. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Village Funds terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal JCC*, Universitas Tanjungpura. Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id>
- Prima, R., Arif, M., & Sari, L. (2023). *Efisiensi Keuangan Daerah dan Penerimaan Pajak Lokal terhadap IPM. Jurnal Ekonomi Pembangunan Regional.*
- Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial.* Retrieved from <https://ojs.ejournalunigoro.com>
- Romer, P. M. (1986). *Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- Sari, R. A., & Lestari, W. R. M. R. (2024). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Jawa Tengah (2017–2021). YRPI Journal.*
- Siagian, Y., et al. (2024). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Studi Provinsi Riau 2010–2022. Indonesian Journal of Education and Development Research (IJEDR)*, 2(2). Retrieved from <https://rayyanjournal.com>
- Soenarko, C. T. (2023). *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Journal of Economics Development Issues (JEDI).*
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi 5). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, S., & Rispawati, D. (2025). *Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Lokal/ResearchGate.*
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Wardani, R. (2024). *Dana Bagi Hasil dan Kesejahteraan Daerah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah.*
- Wiga, W., & Satoto, E. B. (2023). *The Effect of Local Taxes, Human Development Index, and Investment on Labor Absorption and Regional Growth. Wiga Journal.* Retrieved from <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id>
- Wijayanti, D., & Raihansyah, M. (2024). *Dampak Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Studi Empiris Provinsi Riau 2018–2023. Jurnal Aplikasi Bisnis (JABIS)*, 21(2).
- Yoga, G. A. D. M. (2024). *Determinan Kesejahteraan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali (2013–2022). Jurnal Ekuilnmi*, 6(2), 170–181. <https://doi.org/10.36985/jxhymn64>
- Yuliana, S., & Hartono, A. (2023). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Nasional.*
-